

# Keuangan Inklusif antar Provinsi di Indonesia dan Hubungannya dengan Ketimpangan Pendapatan

Malik Abdul Azis Siregar<sup>1\*</sup>, Wiwiek Rindayati<sup>2</sup>, Yeti Lis Purnamadewi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Fakultas Ekonomi & Manajemen, IPB University

<sup>2,3</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

\* Email koresponden: malikabdulazissiregar@apps.ipb.ac.id

Submitted: 2023-08-23 Submitted: 2023-11-06 Accepted: 2023-08-16 Published: 2024-09-12

©2024 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

©2024 by the authors. Majalah Geografi Indonesia.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons

Attribution (CC BY SA) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

**Abstrak** Keuangan inklusif merupakan sistem keuangan yang memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses keuangan. Pada kenyataan, akses keuangan tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, seperti akses keuangan yang tidak merata, ketersediaan layanan dan infrastruktur yang tidak mendukung. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan sekaligus untuk menjawab tujuan bagaimana mengukur indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia, menganalisis determinan inklusi keuangan dan menganalisis hubungan inklusi keuangan dan ketimpangan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi Tobit, analisis tipologi kelas dan analisis kausalitas granger. Indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia berada pada kategori rendah, kecuali DKI Jakarta, Bali dan Kalimantan Selatan masuk dalam kategori sedang. Hasil estimasi determinan inklusi keuangan ditemukan bahwa pengangguran, internet, ponsel, laju pertumbuhan dan rasio jalan berpengaruh terhadap inklusi keuangan.

**Kata kunci:** Inklusi Keuangan, Ketimpangan, Kausalitas Granger

**Abstract** Inclusive finance is a financial system that provides support for low-income people to be able to access finance. In reality, financial access is not enjoyed by all levels of society, such as unequal financial access, inadequate availability of services and infrastructure. This then becomes a challenge as well as to answer the objectives of how to measure the financial inclusion index between provinces in Indonesia, analyze the determinants of financial inclusion and analyze the relationship between financial inclusion and inequality. This research uses Tobit regression analysis, Klassen typology analysis and Granger causality analysis. The financial inclusion index between provinces in Indonesia is in the low category, except for DKI Jakarta, Bali and South Kalimantan which are in the medium category. The estimation results of the determinants of financial inclusion found that unemployment, internet, mobile phones, growth rate and road ratio have an influence on financial inclusion

**Keywords:** Financial Inclusion, Inequality, Granger Causality

## PENDAHULUAN

Inklusi keuangan merupakan sebuah sistem alternatif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses lembaga keuangan formal dan memberikan fasilitas kredit dan investasi pada sektor produktif (Kunt & Klapper, 2013). Inklusi keuangan muncul pertama kali akibat antitesis dari eksklusi keuangan, dimana Leyshon & Thrift (1995) mengemukakan eksklusi keuangan merupakan proses pencegahan masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses lembaga keuangan.

OJK (2020) mendefinisikan inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sarma (2008) menerjemahkan Inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, penggunaan keuangan formal untuk seluruh pelaku ekonomi.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang mendominasi pada industri keuangan di Indonesia. Hal

tersebut terbukti dari tahun 2018-2020 kepemilikan aset perbankan menguasai hampir 80% atau mencapai nilai aset sebesar Rp. 9.177 Triliun dalam industri keuangan. Angka ini sangat fantastis dibandingkan industri keuangan lainnya seperti asuransi yang menguasai aset berkisar 13%, lembaga pembiayaan sebesar 5%, dana pensiun berkisar 2,16%, jasa keuangan khusus sebesar 2,6%, jasa penunjang IKNB sebesar 0,12%, *Financial Technology* sebesar 0,03% dan keuangan mikro sebesar 0,01%.

Selain peningkatan aset, pertumbuhan perbankan juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah yang menyimpan dananya di Perbankan lewat Dana Pihak Ketiga (DPK) serta penyaluran kredit perbankan. Pada tahun 2020 total DPK yang terhimpun sebesar 6,6 triliun rupiah dan angka ini bertumbuh sebesar 66% dibandingkan tahun 2015 dengan total DPK sebesar 4,4 Triliun rupiah, sedangkan penyaluran dana kredit juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu 4,05 Triliun rupiah meningkat pada tahun 2020 sebesar 58% dengan nominal 5,5 Triliun rupiah.

Tabel 1. Aset Industri Keuangan di Indonesia

Lembaga Jasa Keuangan	2018		2019		2020	
	Aset	%	Aset	%	Aset	%
Bank	8.068	77,47	8.562	77,17	9.177	77,71
Asuransi	1.249	11,99	1.357	12,23	1.454	12,31
Dana Pensiun	269	2,58	292	2,63	314	2,66
Lembaga Pembiayaan	589	5,66	625	5,63	591	5
Jasa keuangan Khusus	228	2,19	244	2,2	255	2,16
Jasa Penunjang IKNB	9,6	0,09	11,3	0,1	13,8	0,12
Lembaga Keuangan Mikro	0,7	0,01	1,07	0,01	1,23	0,01
Financial Technology	1,5	0,01	3,04	0,03	3,7	0,03
Total	10.415	100	11.095	100	11.809	100

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, RI (2020)



Gambar 1. Provinsi Terparah Berdasarkan Ketimpangan Pendapatan

(Sumber: BPS RI, 2021)

Peningkatan industri keuangan tersebut kemudian menjadi perhatian bagaimana kinerja perbankan dalam mengatasi eksklusi keuangan, dimana menurut Fauzan (2020), Anggraeni (2009) Kunt & Klapper (2013) pada kenyatannya masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk miskin menghadapi hambatan yang lebih berat untuk memasuki sistem keuangan formal sehingga masyarakat memilih menggunakan lembaga keuangan informal dengan beban bunga yang lebih besar, dampaknya ketimpangan pendapatan tidak kunjung berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat (Allen 2016).

Menurut penelitian Fauzan *et al.* (2020) Puspitasari *et al.* (2020) Azwar (2017) Ummah *et al.* (2015) menemukan pada tahun 2007-2016 bahwa seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah, terkecuali Provinsi DKI Jakarta dengan kategori tinggi. Hal ini menggambarkan sistem keuangan antar Provinsi di Indonesia tergolong eksklusif atau masih dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi, rendahnya kesiapan infrastruktur layanan keuangan dan minimnya penggunaan keuangan perbankan. Menurut Andaiyani *et al.* (2022) Azwar (2017) pada faktanya Industri keuangan yang berkembang pesat tidak selalu disertai akses keuangan yang memadai, sementara akses jasa layanan keuangan merupakan

satu syarat penting dimana diperlukan keterlibatan masyarakat luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beberapa hasil penelitian yang dikemukakan oleh Joan (2022) Khoirunnurrofik (2021) Akuywen (2018) Ahamed (2017) Rajendran (2013), mengemukakan bahwa pembangunan sektor keuangan yang inklusif berkontribusi terhadap indikator pembangunan seperti kemiskinan maupun ketimpangan. Ariani (2020), Zahara (2021) Inklusi keuangan diidentifikasi sebagai pendorong untuk tujuh dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana inklusi keuangan dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat mengakses layanan keuangan pada setiap lapisan masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, membantu masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola stabilitas keuangan secara mandiri.

Menurut Andaiyani (2022) Azwar (2017) pada faktanya Industri keuangan yang berkembang pesat tidak selalu disertai akses keuangan yang memadai, sementara akses jasa layanan keuangan merupakan satu syarat penting dimana diperlukan keterlibatan masyarakat luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilanjutkan Indonesia termasuk negara dengan inklusi keuangan rendah dimana situasi yang terjadi

apabila tingkat kemiskinan tinggi berdampak pada tingkat pendidikan rendah kemudian menyebabkan masyarakat sulit terinklusi keuangan (*financial included*), hal ini berarti Negara yang jumlah penduduk miskinnya tinggi relatif mengalami tantangan untuk dapat berinklusi keuangan (Nugroho 2014).

Pada gambar 1 dapat dijelaskan secara umum dari tahun 2018-2020, setidaknya terdapat 8 Provinsi dari total provinsi di Indonesia dengan ketimpangan terparah, 3 provinsi diantaranya terus mengalami peningkatan ketimpangan dan 5 provinsi lainnya berfluktuasi. Adapun ketimpangan pendapatan yang paling parah di Indonesia terdapat pada provinsi DI Yogyakarta, kemudian terdapat pada provinsi Gorontalo, provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, provinsi Papua, provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Ketimpangan pendapatan antar golongan di seluruh provinsi Indonesia terjadi menyebar di seluruh pulau di Indonesia, hal ini berarti ketimpangan relatif menyebar dalam suatu wilayah tertentu. Ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia merupakan fenomena yang harus diperhatikan dan penulis mengusulkan inklusi keuangan sebagai hipotesis dalam mereduksi ketimpangan pendapatan. Penguji ingin meninjau lebih jauh seberapa besar hubungan inklusi keuangan dengan ketimpangan pendapatan, artinya 8 provinsi dengan ketimpangan terparah di atas akankah lebih baik jikalau inklusi keuangan mengalami peningkatan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berbentuk data panel dimana datanya merupakan data gabungan dari *cross section* yang berupa data 33 provinsi di Indonesia dengan *time series* yang berupa data dari periode 2016-2020. Menurut Juanda (2009) data sekunder adalah data yang didapatkan dari publikasi hasil kajian suatu instansi lain. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perbankan, Statistik Perbankan Indonesia data publikasi OJK, BPS, Bank Indonesia serta publikasi dari karya ilmiah dan media informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

**Indeks Inklusi Keuangan**

Indeks inklusi keuangan telah dikembangkan Sarma (2008) dengan metode komputasi ataupun perhitungan yang dikonstruksikan berdasarkan 3 dimensi dasar yaitu penetrasi, ketersediaan dan penggunaan. Adapun tahapan perhitungan pertama menghitung indeks dari setiap dimensi dengan mengklasifikasikan nilai maksimum dan minimum setiap dimensi dan tahapan kedua dengan mengukur indeks inklusi keuangan.

Penetrasi perbankan merupakan salah satu dimensi inklusi keuangan untuk mengukur jumlah kepemilikan rekening. Dalam penelitian ini Dana Pihak Ketiga sebagai pengukuran penetrasi dengan rumus sebagai berikut:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah DPK Perbankan}}{\text{Jumlah Penduduk (tahun)t}} \times 1000 \tag{1}$$

Dimensi ketersediaan, hal ini dimaksudkan bahwa sistem keuangan yang inklusif harus memberikan kemudahan dalam layanan bagi seluruh pengguna. Dalam penelitian ini pengukuran ketersediaan menggunakan banyaknya jumlah perkantoran bank, sebagai berikut:

$$D2 = \frac{\text{Jumlah kantor layanan}}{\text{Jumlah Penduduk (tahun)t}} \times 1000 \tag{2}$$

Dimensi kegunaan merupakan ukuran dalam melihat seberapa besar pengguna kredit perbankan. Kepemilikan rekening tidak cukup untuk menggambarkan keuangan inklusif jadi penting layanan keuangan dimanfaatkan secara memadai. Dalam penelitian ini jumlah pembiayaan dari PDB dijadikan untuk mengukur dimensi kegunaan, sebagai berikut:

$$D3 = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Nilai PDRB (tahun)t}} \times 1000 \tag{3}$$

Setelah dilakukan perhitungan setiap dimensi, selanjutnya pengklasifikasian nilai maksimum dan minimum setiap dimensi dengan rumus sebagai berikut:

$$di = \frac{Ai - mi}{Mi - mi} \tag{4}$$

Keterangan:

A<sub>i</sub> = Nilai aktual dari dimensi i

m<sub>i</sub> = Nilai Minimum dari dari dimensi i

M<sub>i</sub> = Nilai Maksimum dari dari dimensi i

Adapun tahapan berikutnya adalah mengukur indeks inklusi keuangan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKi = 1 - \frac{\sqrt{(1 - d1)^2 + (1 - d2)^2 + (1 - dn)^2}}{\sqrt{n}} \tag{5}$$

Rumus Indeks Inklusi Keuangan merupakan rumus indeks untuk setiap dimensi yaitu penetrasi, ketersediaan dan dimensi penggunaan. Dimana Indeks Inklusi Keuangan dikategorikan sebagai berikut: Jika 0.5 < IIK ≤ 1 berarti indeks inklusi keuangan tinggi, jika 0.3 < IIK ≤ 0.5 berarti indeks inklusi keuangan menengah dan apabila 0 < IIK ≤ 0.5 maka inklusi keuangan tergolong rendah.

**Analisis Tipologi Klassen**

Analisis Tipologi Klassen merupakan suatu analisis pengelompokan kategori berdasarkan sektor, subsektor, usaha atau komoditas dengan membandingkan dengan wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya (Widiarsih & Masyaresa, 2020). Hasil analisis tipologi klassen menunjukkan posisi inklusi keuangan dan ketimpangan terbagi menjadi 4 kuadran yaitu: kuadran 1 (inklusi keuangan tinggi dan ketimpangan rendah), kuadran 2 (inklusi keuangan tinggi dan ketimpangan tinggi), kuadran 3 (inklusi keuangan rendah dan ketimpangan tinggi), kuadran 4 (inklusi keuangan rendah dan ketimpangan rendah).

**Analisis Regresi Panel Tobit**

Model regresi Tobit merupakan analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X), dimana variabel dependen tersebut berskala campuran. Menurut Hayashi (2000) regresi Tobit juga regresi tersensor, hal tersebut dikarenakan dependen variabel regresi Tobit nilainya berada pada rentang tertentu.

Adapun persamaan umum analisis regresi Tobit dalam penelitian ini berdasarkan variabel yang diuji adalah:

$$Y_{it} = a_0 + a_1 \text{Pengguguran}_{it} + a_2 \text{melek_huruf}_{it} + a_3 \text{pengguna_internet}_{it} + a_4 \text{pengguna_ponsel}_{it} + a_5 + a_5 \text{laju_pertumbuhan}_{it} + a_6 \text{rasio_jalan}_{it} + \epsilon_{it} \quad (6)$$

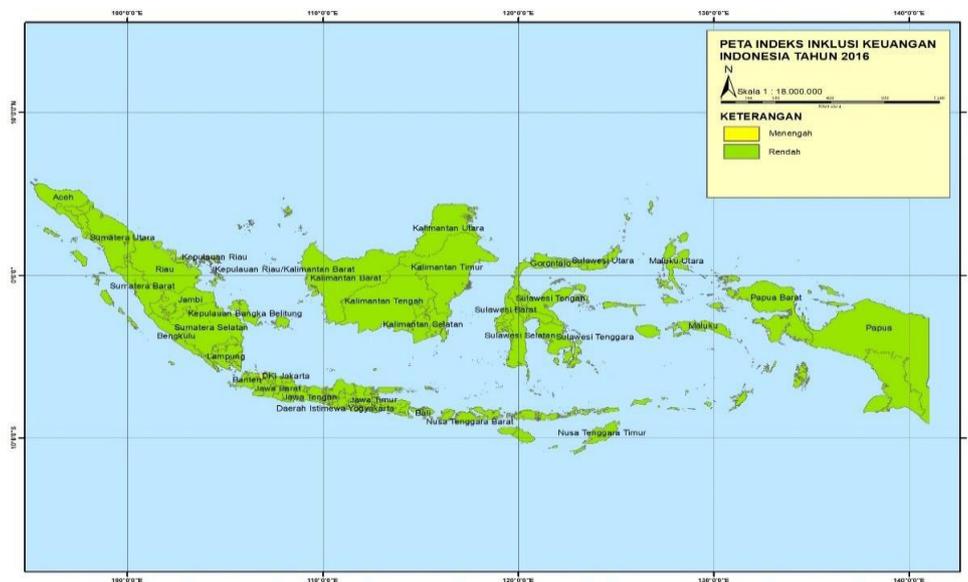
Dimana Y merupakan nilai indeks inklusi keuangan, i adalah identitas yaitu provinsi, dan t menunjukkan tahun analisis. a merupakan koefisien yang diestimasi, sedangkan  $\epsilon_{it}$  merupakan error term. Peubah bebas yang digunakan dalam analisis ini diadopsi dari beberapa penelitian sebelumnya.

**Analisis Kausalitas Granger**

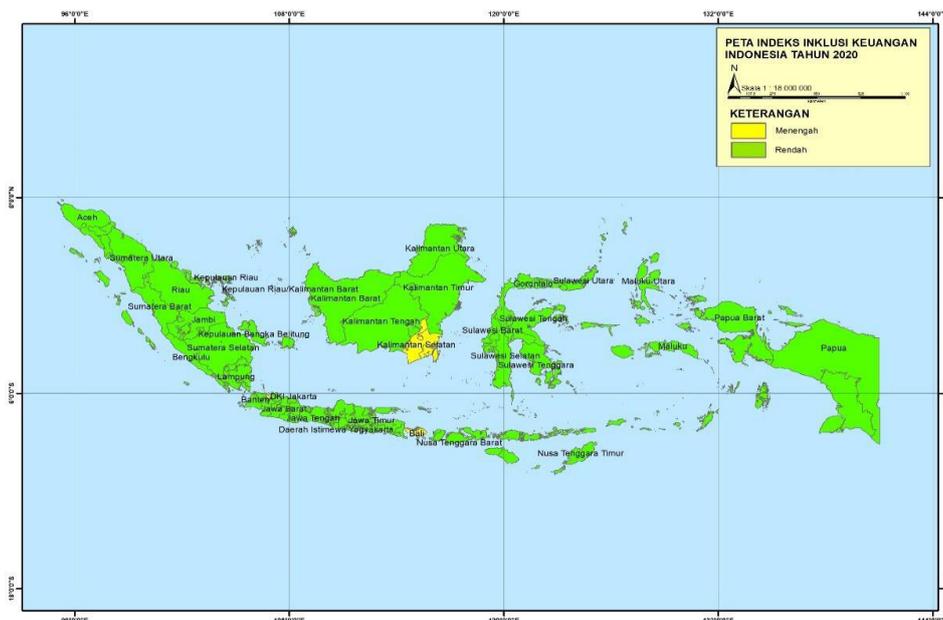
Menurut Nugroho et al. (2014), studi kausalitas granger digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel dan menunjukkan hubungan satu arah dan dua arah antar

variabel. Misalnya menganalisis hubungan X terhadap Y dan Y terhadap X ataupun hubungan dua arah antara X dan Y, adapun uji kausalitas granger ini diyakini jauh lebih menunjukkan hasil yang ideal dibanding korelasi biasa.

Tahapan melakukan analisis kausalitas granger yaitu, pertama menganalisis uji stasioneritas, hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana tingkat stasioneritas antar variabel agar bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Kedua, analisis kointegrasi dilakukan dengan maksud apakah terdapat kointegrasi ataupun pengaruh jangka panjang dengan menggunakan *Vector Autoregressive* (VAR). Adapun tahapan untuk menganalisis kausalitas granger adalah menguji hubungan kedua variabel baik hubungan satu arah maupun hubungan dua arah. Menurut Sutanto (2018) analisis kausalitas granger merupakan alat untuk membedah hubungan dan pengaruh antar variabel dengan selang kepercayaan 95%.



Gambar 2 Peta Inklusi Keuangan antar Provinsi Indonesia tahun 2016  
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3. Peta Inklusi Keuangan antar Provinsi Indonesia tahun 2020  
Sumber: Hasil Analisis, 2022

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kajian dalam pembahasan ini mengelaborasi peta inklusi keuangan dan ketimpangan antar provinsi di Indonesia, mengukur indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia, menganalisis determinan inklusi keuangan, analisis tipologi klassen dan analisis kausalitas granger.

**Peta Indeks Inklusi Keuangan**

Peta indeks inklusi keuangan disajikan pada tahun 2016 dan 2020 dengan tujuan melihat perubahan indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia. Secara umum, belum terdapat satupun provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori tinggi, namun pada kategori menengah terdapat beberapa Provinsi yang diuraikan di bawah ini:

Pada peta 2016 di atas menjelaskan bahwa DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang masuk dalam kategori inklusi keuangan menengah, hal tersebut ditandai dengan

provinsi DKI Jakarta berwarna kuning sedangkan 32 provinsi lainnya masuk dalam kategori inklusi keuangan rendah.

Pada gambar 3 sekaligus menyajikan peta inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan inklusi keuangan pada kategori menengah yaitu provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan selatan. Hal ini menunjukkan sejak tahun 2016 sampai pada tahun 2020 pertumbuhan inklusi keuangan hanya mengalami pertambahan pada dua provinsi yaitu provinsi Bali dan Kalimantan Selatan yang masuk dalam kategori menengah. Adapun total seluruh provinsi yang masuk dalam kategori menengah yaitu DKI Jakarta, Bali dan Kalimantan selatan, sedangkan provinsi lainnya masih dalam kategori rendah, meskipun demikian inklusi keuangan pada wilayah tersebut mengalami pertumbuhan meskipun masih dalam kategori inklusi rendah.

Tabel 2. Indeks Inklusi Keuangan antar Provinsi tahun 2016-2020 (Sumber: Hasil Analisis, 2022)

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Aceh	0.092	0.101	0.130	0.133	0.129	0.117
2	Sumatera Utara	0.145	0.147	0.182	0.178	0.182	0.167
3	Sumatera Barat	0.094	0.094	0.118	0.119	0.125	0.110
4	Riau	0.020	0.020	0.038	0.040	0.047	0.033
5	Jambi	0.085	0.088	0.114	0.137	0.137	0.112
6	Sumatera Selatan	0.072	0.075	0.102	0.099	0.101	0.090
7	Bengkulu	0.178	0.182	0.217	0.213	0.224	0.203
8	Lampung	0.038	0.040	0.056	0.052	0.057	0.048
9	Bangka Belitung	0.184	0.182	0.229	0.235	0.231	0.212
10	Kep. Riau	0.155	0.159	0.190	0.185	0.202	0.178
11	Dki Jakarta	0.492	0.494	0.405	0.402	0.309	0.420
12	Jawa Barat	0.082	0.086	0.113	0.116	0.128	0.105
13	Jawa Tengah	0.080	0.076	0.106	0.106	0.118	0.097
14	Di Yogyakarta	0.187	0.196	0.246	0.243	0.259	0.226
15	Jawa Timur	0.085	0.087	0.121	0.119	0.125	0.107
16	Banten	0.103	0.108	0.152	0.151	0.167	0.136
17	Bali	0.236	0.235	0.278	0.288	0.303	0.268
18	NTB	0.091	0.109	0.159	0.173	0.187	0.144
19	NTT	0.131	0.137	0.185	0.198	0.201	0.170
20	Kalimantan Barat	0.148	0.153	0.189	0.196	0.208	0.179
21	Kalimantan Tengah	0.106	0.120	0.154	0.158	0.173	0.142
22	Kalimantan Selatan	0.181	0.190	0.235	0.317	0.316	0.248
23	Kalimantan Timur	0.091	0.089	0.121	0.123	0.132	0.111
24	Sulawesi Utara	0.194	0.201	0.231	0.232	0.240	0.220
25	Sulawesi Tengah	0.083	0.086	0.095	0.098	0.097	0.092
26	Sulawesi Selatan	0.120	0.118	0.141	0.134	0.138	0.130
27	Sulawesi Tenggara	0.094	0.098	0.126	0.136	0.151	0.121
28	Gorontalo	0.201	0.207	0.229	0.232	0.233	0.220
29	Sulawesi Barat	0.091	0.097	0.118	0.121	0.132	0.112
30	Maluku	0.209	0.218	0.269	0.279	0.284	0.252
31	Maluku Utara	0.199	0.205	0.238	0.255	0.244	0.228
32	Papua Barat	0.214	0.220	0.254	0.281	0.276	0.249
33	Papua	0.090	0.085	0.111	0.151	0.146	0.117
	Indonesia	0.148	0.152	0.181	0.189	0.193	0.172

### Indeks Inklusi Keuangan antar Provinsi di Indonesia

Berdasarkan indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sebanyak 32 Provinsi di Indonesia memiliki nilai inklusi keuangan kategori rendah, namun terdapat diantara provinsi tersebut mengalami peningkatan inklusi keuangan menjadi kategori sedang yaitu provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 dan 2020 serta Provinsi Bali pada tahun 2019. Adapun satu-satunya provinsi dengan kategori sedang adalah DKI Jakarta. Pertumbuhan inklusi keuangan disebabkan adanya peningkatan DPK perbankan, pengguna perbankan dan penambahan ketersediaan layanan ataupun infrastruktur di wilayah tersebut.

### Analisis Tipologi Klassen

Adapun pengklasifikasian tipologi kelas dibagi menjadi 4 kuadran yaitu pertama, keuangan inklusif tinggi dan ketimpangan rendah, kuadran kedua merupakan keuangan inklusif tinggi dan ketimpangan tinggi, kuadran ketiga inklusif rendah dan ketimpangan tinggi dan kuadran keempat merupakan inklusif rendah dan ketimpangan rendah. Penentuan batasan kuadran dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata inklusi keuangan dan ketimpangan pada masing-masing periode 2016 dan 2020 dengan data 33 provinsi di Indonesia. Adapun pada tahun 2016 nilai rata-rata inklusi keuangan yang digunakan adalah 0.14 dan nilai rata-rata ketimpangan pendapatan adalah 0.36.

Berdasarkan gambar 4 dapat diterjemahkan terdapat variasi kuadran pada tipologi kelas, hal ini menggambarkan bahwa analisis inklusi keuangan dan ketimpangan pada masing-masing provinsi relatif beragam. Secara umum terdapat 9 provinsi yang masuk dalam kategori inklusi keuangan rendah dan ketimpangan rendah dan 8 provinsi lainnya turut masuk dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Hal ini berarti terdapat 8 provinsi di Indonesia yang masuk dalam kuadran yang ideal yaitu inklusi keuangan tinggi dan ketimpangan rendah sedangkan 25 provinsi lainnya masih masuk dalam kategori inklusi keuangan rendah ataupun ketimpangan tinggi.

### Analisis Regresi Tobit

Determinan keuangan inklusif di Indonesia dianalisis menggunakan regresi panel tobit. Berdasarkan hasil estimasi determinan keuangan inklusif, diketahui terdapat dua hasil pengolahan regresi tobit, pertama dianalisis dengan menggunakan regresi tobit pada nilai ekstrim dengan tidak melakukan uji normalitas (hasil analisis 1), hal ini disebabkan data yang terkumpul dan tersedia tidak terdistribusi normal. Kedua, pengolahan data dilakukan dengan melakukan uji normalitas (hasil analisis 2) namun pada hasil pengolahan terdapat beberapa perbedaan hasil analisis sebagai berikut.

Secara parsial ditemukan bahwa variabel pengangguran, pengguna internet, pengguna ponsel, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan dan rasio jalan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan sedangkan variabel melek huruf ditemukan tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Pada hasil estimasi di atas ditemukan bahwa variabel pengangguran berpengaruh pada signifikansi 1% dan secara koefisien nilainya negatif, hal ini menunjukkan semakin tinggi pengangguran maka berdampak pada penurunan tingkat inklusi keuangan. Adapun nilai koefisien variabel pengangguran sebesar -0,009 hal ini berarti setiap pengangguran sebesar 1 poin maka dapat mengurangi inklusi keuangan sebesar 0,009 poin.

Variabel pengguna internet dan pengguna ponsel berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan pada taraf signifikansi masing-masing 1% & 5%. Secara nilai koefisien pengguna internet dan pengguna ponsel berhubungan positif sebesar 0,0009 & 0,002, hal ini dapat didefinisikan setiap kenaikan pengguna internet dan ponsel sebesar 1 poin maka akan berdampak pada pertambahan inklusi keuangan masing-masing sebesar 0,0009 dan 0,0042 poin. Hasil temuan ini berarti kemajuan teknologi khususnya internet dan telepon selular telah mempengaruhi sistem keuangan modern. Menurut Fauzan (2020) Abel (2018) dari sisi permintaan terdapat peningkatan penggunaan teknologi internet dan telepon selular lewat anggota rumah tangga yang berdampak besar bagi inklusivitas sistem keuangan dikarenakan beragam pilihan akses masyarakat untuk mengakses lembaga

<p>Kuadran 3 Inklusif Rendah, Ketimpangan Tinggi</p> <p>Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua.</p>	<p>Kuadran 2 Inklusif Tinggi, Ketimpangan Tinggi</p> <p>DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat.</p>
<p>Kuadran 4 Inklusif Rendah, Ketimpangan Rendah</p> <p>Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah.</p>	<p>Kuadran 1 Inklusif tinggi ketimpangan rendah</p> <p>Sumatera Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara,</p>

**Gambar 4. Tipologi Klassen tahun 2020**

Sumber: Hasil Analisis (2022)

**Tabel 3.** Hasil Estimasi Regresi Panel Tobit (Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Variabel	Coefficient	Probabilitas
Constanta	-0,1325	0,482
Pengangguran	-0,0093 ***	0,000
Melek huruf	0,0011	0,605
Pengguna Internet	0,0009 ***	0,002
Pengguna ponsel	0,0029 **	0,014
Laju Pertumbuhan	-0,0016 ***	0,009
Rasio Jalan	0,0322 ***	0,000
Wald Chi2	195,90	
Log likelihood	356,84	
Prob > Chi2	0,000	

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

keuangan. Menurut Kim (2018), Minto-coy & McNaughton (2016), Parvin (2013) dengan menyediakan *mobile financial service* merupakan aspek penting dari pemberian layanan dan di beberapa negara berkembang, bank dan operator jaringan selular memiliki pandangan positif tentang penawaran *mobile financial service*.

Adapun variabel laju pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan dan secara koefisien hubungannya negatif, hal ini menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016-2020 dapat menurunkan inklusi keuangan. Temuan ini tidak mendukung penelitian sebelumnya, jika dilihat struktur data laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia, pada tahun 2016-2019 tampak terlihat laju pertumbuhan ekonomi relatif stabil meskipun terdapat fluktuasi pertumbuhan namun pada tahun 2020 sebanyak 30 dari total 33 provinsi di Indonesia mengalami laju pertumbuhan negatif. Hal ini menandakan terjadi perubahan laju pertumbuhan yang ekstrim dari periode 2016-2019 menuju 2020, yang berdampak pada hasil signifikansi dimana koefisien negatif.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memang relatif kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada periode tersebut terjadi akibat efek covid-19 yang membuat perekonomian melambat secara ekstrim, pada periode tersebut menjadikan hampir seluruh sektor harus beradaptasi dan mengubah pola manusia bekerja. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Junaedi & Salistia (2021), dengan menguji dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasilnya yang menarik adalah hampir seluruh variabel bebas berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya pada situasi covid-19 (umumnya terjadi kontraksi) variabel waktu terpapar, jumlah populasi dan belanja pemerintah dapat memberi efek tekanan negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi turut berpengaruh signifikan dan koefisien negatif juga menandakan bahwa laju pertumbuhan mengalami pemusatan pertumbuhan ekonomi sehingga hubungannya negatif terhadap inklusi keuangan. Artinya pertumbuhan tidak terjadi secara merata dan berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan formal.

Hasil estimasi rasio panjang jalan turut berpengaruh positif pada taraf signifikansi 1% dengan nilai koefisien 0,032, hal ini berarti setiap kenaikan rasio panjang jalan sebesar 1 poin maka akan berdampak pada peningkatan inklusi

keuangan sebesar 0,032 poin. Upaya peningkatan inklusi keuangan sesungguhnya juga upaya untuk meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, kegiatan ekonomi, hal ini dikarenakan keterbukaan akses, ketersediaan layanan dan penggunaan kredit tentu membutuhkan jalan yang lebih memadai untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagaimana temuan Pradhan (2022) menjelaskan bahwa panjang jalan raya nasional positif dan signifikan menentukan inklusi keuangan, hal ini timbul karena penekanan pada pembangunan infrastruktur dan sektor energi oleh rezim politik yang berkuasa.

Pada penelitian ini variabel melek huruf tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan yang ditandai dengan taraf signifikansi lebih dari 0.05. Temuan ini senada dengan penelitian Ummah (2015), Atikah (2016) bahwa variabel melek huruf tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan, artinya kemampuan individu untuk dapat mengakses lembaga keuangan tidak serta merta ditentukan oleh kemampuan membaca dan menulis namun lebih kepada keinginan individu terkait untuk ikut andil dalam lembaga keuangan. Dilanjutkan Park (2017) angka melek huruf tidak mempengaruhi inklusi keuangan pada sampel lingkup Asia sebanyak 37 Negara.

### Analisis Kausalitas Granger

Analisis ekonometrika terkait hubungan inklusi keuangan dengan ketimpangan pendapatan dianalisis dengan menggunakan analisis Kausalitas Granger. Adapun tahap pertama untuk menganalisis kausalitas granger adalah dengan melakukan uji stasioneritas setiap variabel. Dari hasil pengujian unit root test, variabel indeks inklusi keuangan tidak stasioner di tingkat level dan stasioner di tingkat first difference dengan tingkat signifikansi 5% ( $P < 0,05$ ) sedangkan variabel gini rasio stasioner di tingkat level dengan taraf signifikansi 5% ( $P < 0,05$ ).

Setelah pengujian unit root test, tahapan berikutnya adalah pengujian kointegrasi. Berdasarkan uji *pedroni residual cointegration test* dapat diketahui bahwa variabel indeks inklusi keuangan memiliki hubungan kointegrasi atau jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini dikarenakan nilai panel rho-statistic dan panel Philip Perron (PP) di bawah tingkat signifikansi 5% (0.05).

Adapun pengujian tahap selanjutnya sebelum menganalisis kausalitas granger adalah uji lag optimum, uji lag optimum merupakan uji untuk mengidentifikasi lag yang

**Tabel 4.** Unit Root Test

	PP – Fisher Chi-square	Prob.
Indeks Inklusi Keuangan	108.673	0,0013
Gini Rasio	119.586	0,0001

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

**Tabel 5.** Uji Kointegrasi (Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Method	Staistic	Prob	Weighted Statistic	Prob
Panel rho-Statistic	-4.1682	0.0000	-3.7003	0.0001
Panel PP-Statistic	-12.5066	0.0000	-9.4572	0.0000

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

**Tabel 6.** Unit Lag Optimum

Lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
1	123.0569	1.37e-08	-12.43362	-12.16426	-12.34167
2	32.08305*	5.74e-09	-13.30463	-12.85570*	-13.15154*
3	7.930023	5.45e-09*	-13.36304*	-12.73454	-13.14871

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Keterangan:

LR : Sequential modified LR test statistic

PFE : Final prediction error

AIC : Akaike information criterion

SC : Schwarz information criterion

HQ : Hannan-Quinn information criterion

**Tabel 7.** Kausalitas Granger

Null Hypothesis	Indeks Inklusi Keuangan menggunakan data First Difference		Indeks Inklusi Keuangan tidak menggunakan data First Difference (tingkat level)	
	F-Statistic	Prob	F-Statistic	Prob
IKK does not Granger Cause Gini	0.03193	0.8585	0.17183	0.6792
Gini does not Granger cause IKK	0.42703	0.5150	0.73541	0.3927

Sumber: Hasil Analisis, 2022

paling optimum dengan metode yang diuji. Hasil pengujian menggambarkan bahwa sebagian besar metode menunjukkan lag optimum di 2, sebagaimana metode LR, SC dan HQ optimum pada lag 2.

Pada hasil analisis kausalitas granger di bawah terdapat dua hasil, pertama data indeks inklusi keuangan menggunakan data *first difference* kemudian hasil yang kedua data indeks inklusi keuangan tidak menggunakan *first difference*. Hal ini disebabkan pada saat uji stasioneritas, indeks inklusi keuangan stasioner pada *first difference* sedangkan gini rasio stasioner tanpa menggunakan *first difference* atau pada tingkat level. Hasil dari kedua data tersebut menjelaskan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara variabel indeks inklusi keuangan dengan gini rasio begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil uji kausalitas granger, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat dari variabel gini terhadap indeks inklusi keuangan atau

sebaliknya, hal ini dikarenakan nilai probabilitas melebihi tingkat signifikansi 5% ( $P > 0.05$ ). Menurut penelitian Park & Mercado (2017) tampaknya tidak ada hubungan inklusi keuangan dan ketimpangan untuk sampel Asia sebagai negara berkembang, namun pada sampel dunia inklusi keuangan dan ketimpangan memiliki korelasi yang signifikan. Hal ini senada dengan hasil penelitian penulis pada data antar provinsi di Indonesia, bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat inklusi keuangan dan ketimpangan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inklusi keuangan ke-32 provinsi di Indonesia masih tergolong rendah kecuali provinsi DKI Jakarta tergolong sedang. Adapun provinsi Bali dan Kalimantan Selatan turut masuk dalam kategori sedang pada tahun 2020, artinya kedua provinsi tersebut mengalami pertumbuhan dari sisi inklusi keuangan. Hasil estimasi

determinan inklusi keuangan menemukan bahwa 4 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan, yaitu PDRB, indeks gini, panjang jalan dan internet, sedangkan 4 variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Hasil kausalitas granger menemukan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara inklusi keuangan dan ketimpangan.

### KONTRIBUSI PENULIS

**Penulis pertama** mendisain kerangka penelitian, mendisain metodologi, menganalisis hasil penelitian dan membuat naskah publikasi. **Penulis kedua** membantu mendisain metodologi, interpretasi dan analisis hasil penelitian; dan **Penulis ketiga** melakukan penajaman isu dan konsep penelitian.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada IPB Univeristy yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu lebih dan mendukung penelitian ini. Terimakasih juga kepada pembimbing, mentor dan kawan-kawan PWD 2019, kawan-kawan Tazkia atas support sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

Abel, Sanderson. Mutandwa, Learnmore. Roux, Pierre Le. (2018). A Review of Determinants of Financial Inclusion. *International Journal of Economics and Financial Issues*

Ahamed, M Mostak K Sushanta., Mallick, K. (2017). Is financial inclusion good for bank stability? *International evidence. Journal of Economic Behaviour & Organization*.

Akuywen, Roberto Mangowal., Caroline. (2018). Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan Dan Indikator Pembangunan Di Indonesia. *MODUS Vol. 30 (1): 96-109 ISSN 0852-1875 / ISSN (Online) 2549-3787*.

Allen et al. (2016). *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts*. Policy Research Working paper 6290, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank

Andaiyani, Sri. Adnan, Nazeli. Yunisvita. Riswa, Muhammad. (2022). Does Financial Reduce Income Inequality in South Sumatera. *Journal of Enterprise and Development Vol 4, No 1*.

Anggraeni L. (2009). Factor Influencing and Credit Constraints of a Financial Self-Help Group in a Remote Rural Area: The Case of ROSCA and ASCRA in Kemang Village West Java. *Journal of Applied Sciences. 9(11):2067- 2077*

Ariani, N., Yuyetta, E.N., Hardiningsih, P. (2020). The Support of Sharia Rural Banks Financing on National Financial Inclusion. *International Journal of Islamic Bussiness and Economics (IJIBE) Vol 4 No 1 2020*.

Atikah. Ma'ruf, Ahmad. (2016). Analisis Keuangan Inklusif: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, Nomor 1, April 2016, hlm. 31-45*.

Azwar. (2017). Analisis Empiris Inklusifitas Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal BPPK Volume 10 Nomor 1 Halaman 1-21*

Badan Pusat Statistik Republik Indoensia. (2021). "Kontribusi Perbankan Terhadap PDB". Diakses tahun 2022 melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Fauzan, Iwan Fathi., Firdaus, Muhammad. Sahara. (2020). Regional Financial Inclusion and Poverty: Evidence from Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*.

Hayashi Fumio. (2000). *Econometrics*. New Jersey (US): Princeton University Press

Juanda, Bambang. (2009). *Ekonometrika: Permodelan dan Pendugaan*. Bogor: IPB Press

Junaedi D. Salistia F. 2020. Dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi negara terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.

Joan, N Ozoh., Uche, CN. Ebele SN. (2022). Impact of Financial Inclusion on Household Welfare in Nigeria. *Asian Journal of Economics, Bussiness and Accounting*.

Kim, Minjin. Zoo, Hanah. Lee, Heejin. Kang, Juhee. (2018). Mobile financial services, financial inclusion, and development: A systematic review of academic literature. *Wiley. E J Info Sys Dev Countries*.

Kunt & Klapper. 2013. "Measuring Financial Inclusion: Explaining Variation in Use of Financial Services across and within Countries. *Brookings Papers on Economic Activity, Spring*.

Khoirunurrofik. Fitriatinnisa, Dipta. (2021). Financial Inclusion, Poverty, Inequality; Empirical Evidence from Provincial in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*.

Leyshon & Thrift. (1995). *Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States*. The Royal Geographical Society.

Minto-Coy, I., & McNaughton, M. 2016. "Barriers to entrepreneurship and innovation: An institutional analysis of mobile banking in Jamaica and Kenya". *Social and Economic Studies, 65(2-3), 99-131*.

Nugroho, Ari. Purwanti, Evi Yulia. (2014). "Determinan Inklusi Keuangan Di Indonesia (Global Findex 2014)". *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*

OJK. (2020). *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia*. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

OJK. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SLNKI) 2021-2025*.

Park, Cyn Young & Mercado, Rogelio. (2017). *Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality*. *The Singapore Economic Review*.

Parvin, A. (2013). Mobile banking operation in Bangladesh: Prediction of future. *Journal of Internet Banking and Commerce, 18(1), 1-15*.

Pradhan, Kalandi C. Sharma, Ritik. (2022). Assessing the Spatiotemporal Financial Inclusion and its determinants: a sub-national analysis of India. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*.

Puspitasari, Sindi. Mahri, A. Utami, Suci. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Syariah Vol 4 No 1*

Rajendran, K. (2013). *Financial Inclusion, Financial Exclusion and Inclusive Growth*. SSRN Electronic

Sarma, M. 2008. *Index of Financial Inclusion*. European: Indian Council for Research on International Economic Relations. Working Paper No. 21

Sutanto, Himawan. (2018). Analisis VAR (Vector Autograsive) Permintaan dan Penawaran Kunjungan Wisatawan Domestik di Kabupaten Lombok Utara. *Ekonobis Universitas Mataram. Statistik Perbankan Indonesia, OJK. (2013.2021) www.ojk.go.id*

Ummah, BB. Nuryartono, N., Anggraeni, L. (2015) " Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Kebijakan*.

Widiarsih, Dwi. Masyaresa, Ade. (2020). Analysis of Main Economic Sector in Dumai City in 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*

Zahara, Salma Nurul. Ruhadi. Setiawan. (2021). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia". *Jurnal of Applied Islamic Economic and Finance*.